

MANAJEMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA GORONTALO

Oleh; Melan Angriani Asnawi

E-Mail: melanasnawi @ Yahoo.co.id

Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Program KB Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa kini dan depan, yang menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

Manajemen Program Keluarga Berencana di Kota Gorontalo sendiri sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada indikator pengelolaan program KB di Kota Gorontalo, indikator pelaksanaan dan pencapaian tujuan manajemen Program KB, serta pengorganisasian program KB di Kota Gorontalo.

Kata Kunci ; Manajeme ,dan PKB

Pendahuluan

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada era reformasi dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis. Paradigma baru dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah posisi Program KB. Sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini eksistensinya sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah kabupaten/kota termasuk perubahan pengelolaan program lini di lapangan.

Perubahan paradigma ini otomatis berimplikasi pada perubahan sistem dan manajemen program pelayanan KB, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kondisi ini mengharuskan daerah memiliki kesiapan yang matang dalam melayani masyarakat termasuk dalam program pelayanan KB. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu rusan wajib pemerintah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan program KB dan program KS tersebut di daerahnya masing-masing.

Tantangan yang dihadapi yaitu adanya desentralisasi membuat kebijakan nasional tidak serta merta dapat diterima di masing-masing daerah, anggaran yang terbatas membuat sosialisasi KB harus dapat dicari strategi dengan memanfaatkan elemen masyarakat lain dan anggaran yang efektif, dan *image* masyarakat harus diubah tidak lagi membatasi kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia, dan mensinergikan program KB dengan pandangan agama yang masih bertentangan.

Kota Gorontalo sendiri sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas Kota Gorontalo telah membentuk lembaga yang mewadahi pelaksanaan program KB yakni melekat pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo khususnya Bidang Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Struktur kelembagaan tersebut merupakan wadah yang mengemban tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Mengacu lima hal pokok yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui asas desentralisasi maka sudah seharusnya bahwa pembentukan wadah pelaksanaan Program KB sebagaimana telah dipaparkan di atas merupakan cerminan dari menyangkut komitmen pemerintah daerah terhadap program KB, yang ditunjukkan dengan pendayagunaan pelaksana program secara optimal, peningkatan sistem manajemen program KB Nasional yang tetap dilanjutkan di daerah dengan penyesuaian seperlunya, dan pemberian dukungan sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Manajemen

Pengertian Manajemen

Berkenaan dengan penggunaan *manajemen*, Brantas (2009) mengemukakan bahwa berdasarkan pendapat dari para ahli di bidang ilmu manajemen, akar kata manajemen dari bahasa latin yaitu "*mano*" berarti tangan, menjadi "*manus*" artinya bekerja berhati-hati dengan mempergunakan tangan dan "*agere*" artinya melakukan sesuatu, sehingga menjadi "*managiare*" yang berarti melakukan sesuatu berhati-hati dengan mempergunakan tangan-tangan. Artinya dalam mengerjakan sesuatu, pimpinan tidak hanya bekerja sendiri tetapi melalui kegiatan orang lain (bawahan) yang merupakan tangan-tangan pembantu dalam menyelesaikan

pekerjaan tersebut sampai tuntas. Dalam bahasa Perancis, “*menager*” berarti tindakan untuk membimbing atau memimpin, “*menager*” berarti pembina yang melakukan tindakan pengendalian bimbingan dan pengarahan dari suatu rumah tangga dengan berbuat ekonomis sehingga dapat mencapai tujuannya.”

Menurut Rahayu (2004) istilah manajemen berasal dari kata *management* (bahasa Inggris), turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketata laksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (1993), manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *managing* dan orang yang melakukannya disebut *manager*. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manager dalam sebuah organisasi. Herujito (2003) mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengelolaan “suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang untuk bekerja”. Pendapat senada dikemukakan pula oleh Handoko (1992) yang menyatakan bahwa manajemen adalah “bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*staffing*), pengarahan (*directing*), serta pengendalian (*controlling*)”. Selanjutnya Handoko (2003) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi-definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau dengan tidak melakukan tugas-tugas mungkin tidak diperlukan.

Dari berbagai definisi para ahli di atas dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu kegiatan, pelaksanaannya yaitu “*managing*” (pengelolaan), sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.

Konsep Program Keluarga Berencana

Pengertian Keluarga Berencana

Menurut World Health Organisation (WHO) (Anonim, 2005), Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk:

- a. Mendapatkan objek tertentu;
- b. Menghindari kelahiran yang tidak direncanakan;
- c. Mendapatkan kelahiran yang memang direncanakan;
- d. Mengatur interval di antara kehamilan;
- e. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami isteri.

Menurut Hanafi (1994), Secara garis besar definisi ini mencakup beberapa komponen dalam pelayanan kependudukan/KB yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- b. Konseling
- c. Pelayanan kontrasepsi
- d. Pelayanan infertilitas
- e. Pendidikan seks (*sex education*)
- f. Konsultan pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan
- g. Konsultasi genetik
- h. Adopsi

Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. (Anonim, 2008)

Program KB Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa kini dan depan, yang menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

Program KB Nasional di Era Otonomi Daerah

Pada bagian ini akan dipaparkan Program Keluarga Berencana Nasional beserta sistem pengelolaannya yang disadur dari buku Sosialisasi Program KB Nasional yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Nasional yang telah menjadi acuan pengelolaan Program KB Nasional secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, sampai ke tingkat RT/RW. (Anonim, 2005)

Terwujudnya keluarga berkualitas, yang menjadi visi Program KB, diharapkan dapat membangun generasi baru bangsa Indonesia yang mumpuni di masa depan dan menjadi sumber daya pembangunan yang tangguh dan mandiri, serta mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya dalam era

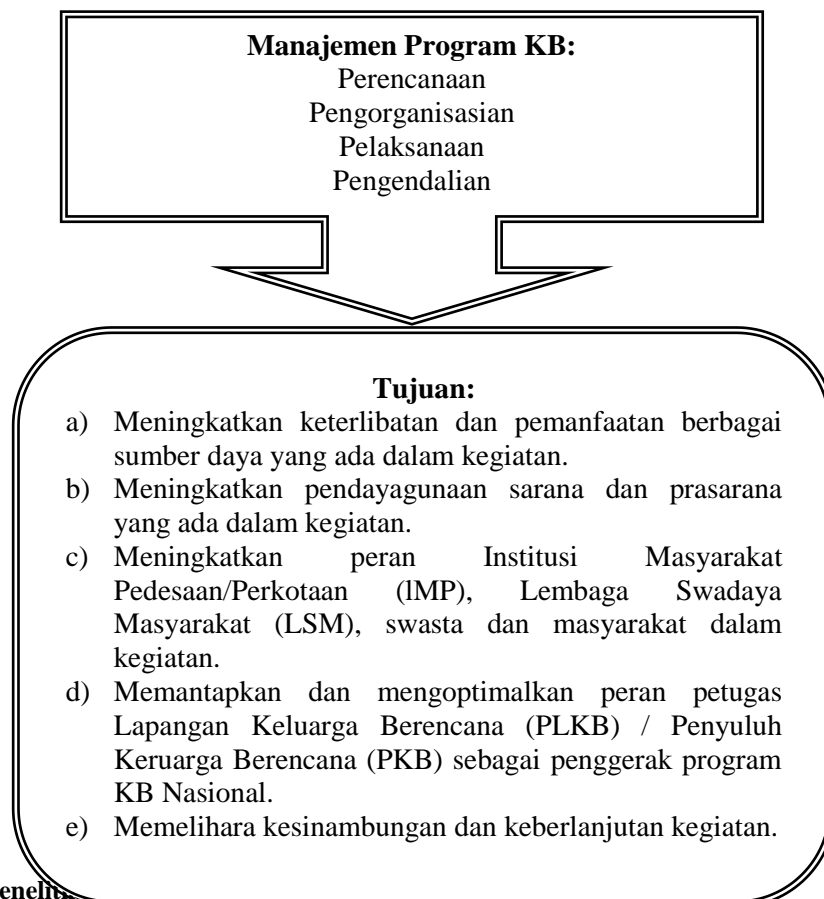
globalisasi dan persaingan bebas saat ini. Selama lebih dari tiga dasawarsa, program KB Nasional di Indonesia telah memberikan hasil yang sangat menggembirakan. Keberhasilan ini tidak saja diakui secara nasional, tetapi juga oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk Badan Kependudukan PBB yang telah menunjuk Indonesia menjadi salah satu pusat rujukan (*center of excellence*) di bidang kependudukan, KB, dan kesehatan reproduksi.

Sejak awal tahun 2004, Program KB Nasional di Indonesia memasuki babak baru, karena sebagian besar kewenangan bidang KB ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam era baru ini, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang yang besar dalam mengatur program-program pembangunan, termasuk bidang KB, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan aspirasi masing-masing. Sejalan dengan era baru ini, pengelolaan Program KB Nasional tidak lagi dilakukan seperti di masa sebelumnya, sehingga dirumuskan berbagai mekanisme baru pengelolaan program.

Selama lebih tiga puluh tahun sejak 1970, pelaksanaan program KB Nasional telah menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan semakin melembaganya keluarga kecil bahagia dan sejahtera pada setiap keluarga Indonesia. Pengaruh globalisasi dan reformasi telah menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan strategis yang sangat mendasar seperti pelaksanaan otonomi daerah dan menguatnya tuntutan akan hak asasi manusia (HAM). Hal ini membawa konsekuensi pada perubahan visi program KB Nasional yang semula melembagakan norma "Keluarga Kecil" yang bahagia dan sejahtera menjadi "Keluarga Berkualitas" dengan ciri-ciri keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kerangka Pikir

Bertolak dari tinjauan pustaka sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat disusun sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 berikut ini.



Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya (Singarimbun dan Effendi, 1995). Dengan demikian, yang terpenting bagi peneliti yakni adanya minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Titik tolak yang sesungguhnya bukanlah metode penelitian, tetapi kepekaan dan minat yang ditopang dengan akal yang sehat (*common sense*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menginterpretasikan Manajemen Program KB pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo.

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tehnik analisis kualitatif. Tehnik ini bertujuan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih rinci. Alasan digunakannya tehnik ini sebagai berikut:

1. Mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetail dan mendalam dari beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang erat kaitannya dengan variabel-variabel yang diteliti.
2. Analisis deskriptif kualitatif dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan konsep.

Pembahasan

Fokus masalah yang dicari jawabannya dalam penelitian ini ialah bagaimana manajemen program KB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Untuk mengamati fenomena manajemen program KB dalam penelitian ini digunakan lima indikator manajemen program KB yakni: (a) Perencanaan; (b) Pengorganisasian; (c) Pelaksanaan; (d) Pengendalian; dan (e) Pencapaian Tujuan Manajemen Program KB. Yang menjadi obyek kajian ialah manajemen program KB dan subyeknya ialah pimpinan dan pejabat struktural pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo.

Dari segi perencanaan, sasaran pengelolaan KB di Kota Gorontalo diarahkan untuk menciptakan keluarga kecil dan sejahtera, menekan jumlah kelahiran dengan motto dua anak lebih baik sehingga kebutuhan dasar keluarga bisa terpenuhi. Proses penetapan sasaran yang akan dicapai tersebut dirancang dalam sebuah rencana kegiatan bersama instansi terkait serta mitra kerja lainnya seperti Dinas Kesehatan, BNP, LSM, dan organisasi kewanitaan.

Masalah yang sering ditemui di lapangan antara lain PUS yang baru menikah enggan mengikuti Program KB dengan berbagai alasan antara lain takut kegemukan, beragam penyakit akan timbul sebagai efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesalahan persepsi atau kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap alat kontrasepsi atau metode KB. Oleh karenanya dirasa perlu untuk mengadakan pendekatan/persuasif kepada PUS secara lebih intensif oleh PLKB dan PKB di wilayah ini serta kegiatan sosialisasi oleh pemerintah tentang alat kontrasepsi atau metode KB.

Di tinjau dari segi persiapan tenaga pelaksana pengelola program KB yakni tenaga PLKB di Kota Gorontalo masih kurang memadai. Jumlah tenaga PLKB di Kota Gorontalo hanya berjumlah 6 orang yang bertugas melayani 6 kecamatan yang ada di Wilayah Kota Gorontalo yakni Kecamatan Kota barat, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Tengah dan Kecamatan Duingingi. Idealnya setiap PLKB melayani maksimal 2 kelurahan. Kota Gorontalo memiliki 49 Kelurahan dengan demikian jumlah PLKB di Kota Gorontalo kurang lebih 24 orang, jadi perlu penambahan sebanyak 18 PLKB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dan pengelolaan Program KB selama ini tidak seperti zaman orde baru yang masih memberikan pos yang besar kepada Program KB. Penyebabnya ialah bahwa program KB di Kabupaten/Kota sekarang ini telah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. Jadi pembiayaannya tentu disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan daerah. Zaman orde baru Kota Gorontalo mendapat suplay dana tersendiri dari BKKBN pusat, tetapi sekarang semua terpusat di daerah. Tetapi dengan anggaran secukupnya sekarang ini, program KB di Kota Gorontalo dapat dikatakan cukup berhasil.

Sumber pembiayaan pengelolaan program KB di Kota Gorontalo adalah APBD dari Pemerintah Kota Gorontalo dan APBN yakni dari BKKBN Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya proses penyiapan dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan Program KB tersebut cukup dituangkan dalam usulan anggaran bidang KB melalui APBD Kota Gorontalo. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota Gorontalo selama ini belum mencukupi terutama untuk dana operasional, insentif PLKB, dan lain-lain. Tetapi untuk pengadaan obat dan alat kontrasepsi sudah cukup memenuhi karena disuplay oleh BKKBN Provinsi Gorontalo.

Di tinjau dari segi sarana penunjang, khusus untuk program KB sekarang ini tersedia 1 unit mobil penerangan (Mini Bus) dan 2 unit motor. Tetapi fasilitas pendukung untuk klinik KB belum sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini, misalnya pengadaan alat sterilisasi masih menggunakan sistem manual, sedangkan saat ini sudah banyak menggunakan sistem digital. Menurut para informan bahwa pengadaan sarana-sarana pendukung yang diusulkan melalui DAK maupun DAU belum sepenuhnya terealisasi. Sementara pengadaan sarana dan prasarana sering kali kurang memperhatikan kebutuhan di lapangan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan program KB di Kota Gorontalo disusun secara jelas dan rasional. Semua kegiatan sudah terjadwal sebelumnya. Proses penentuan jadwal kegiatan dilaksanakan setiap awal tahun. Rencana kegiatan dalam perencanaan operasional merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing instansi terkait, mitra kerja dan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kota Gorontalo secara berkala mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, BKKBN Provinsi Gorontalo.

Perencanaan program KB di Kota Gorontalo dipadukan dengan program pembangunan lainnya. Dalam hal ini, program KB selalu berbarengan dengan program-program lain seperti PNPM, Bazar, Gerakan Sayang Ibu (GSI). Di samping itu, perencanaan kegiatan operasional KB selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh aparat teknis di lapangan, dan telah menjadi komitmen dari seluruh instansi dan sektor terkait. Program KB menjadi komitmen bersama seluruh sektor yang terkait, sebab pemerintah kota menyadari dengan bertambahnya penduduk akan menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, pendidikan dan sarana/prasarana lainnya. Oleh karenanya, seluruh unsur yang berkaitan dengan pemecahan masalah KB dilibatkan secara terintegrasi dalam perencanaan kegiatan, mengingat KB merupakan program nasional yang harus digiatkan secara berkesinambungan.

Di tinjau dari segi pengorganisasian program KB di Kota Gorontalo, penetapan jumlah dan kualifikasi serta penataan tenaga pelaksana program KB selama ini dirasakan masih kurang optimal. Misalnya, tenaga PLKB yang telah memiliki keahlian khusus dan terlatih di bidang KB dimutasi ke instansi lain yang tidak memiliki tupoksi yang berkaitan dengan program KB. Kebijakan seperti ini tentu sangat mengganggu operasionalisasi program KB. Pemerintah berkewajiban untuk menghindari kebijakan yang dapat mengganggu efektivitas program KB termasuk pemutasian tenaga PLKB yang masih sangat minim jumlahnya.

Di tinjau dari aspek penetapan sarana, prasarana, yang diperlukan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB khususnya Bidang KB berupaya mengoptimalkan penggunaan sarana yang tersedia sedemikian rupa agar mampu menunjang efektivitas program KB. Untuk pelayanan massal dalam jumlah yang besar, BKKBN Provinsi Gorontalo selalu mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik alat transportasi, maupun obat-obatan, alat kontrasepsi serta tenaga medis.

Di tinjau dari segi OTK (Organisasi dan Tata Kerja) bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, sekarang ini kurang proporsional. Untuk program KB di Provinsi Gorontalo terdapat BKKBN yang kedudukannya bersifat vertikal, tetapi di Kota Gorontalo masih merupakan salah satu bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB. Oleh karenanya ke depan diperlukan pembenahan nomenklatur di mana bidang KB di kelola secara tersendiri dalam satu dinas atau badan, sehingga pengelolaan dan penganggarannya akan semakin fokus dan terarah.

Di tinjau dari aspek pelaksanaan program KB di Kota Gorontalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa program KB di wilayah ini mengalami peningkatan, hal ini antara lain dapat dilihat pada keberhasilan Kota Gorontalo memperoleh juara 1 pada kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tingkat Provinsi Gorontalo dan penghargaan tingkat nasional pada Metode Operasi Pria (MOP) vasektomi.

Pelaksanaan KB di Kota Gorontalo diarahkan untuk memperkuat keluarga dalam pengendalian kelahiran, menciptakan keluarga berkualitas dengan 2 anak lebih baik, serta untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan KB di Kota Gorontalo sangat membantu pasangan suami isteri dalam peningkatan kesehatan reproduksi.

Pelaksanaan program KB di Kota Gorontalo diarahkan guna memantapkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga sehingga menjadi keluarga yang berkualitas. Oleh karenanya diperlukan komitmen dari seluruh Kementerian/Dinas agar selalu menggalakan program KB menjadi prioritas dan pilihan utama bagi penduduk terutama bagi PUS yang baru menikah.

Di tinjau dari aspek pengendalian operasional, pengelolaan KB di Kota Gorontalo menerapkan sistem pengawasan melekat. Pengawasan dilakukan guna mengevaluasi tingkat keberhasilan yang dicapai serta kendala yang mungkin dihadapi untuk dicari pemecahannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan program KB di Kota Gorontalo, antara lain Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Inspektoriat Daerah untuk dana APBD dan Itjen dan BPKP Sulut untuk dana APBN.

Pengendalian / pengawasan program KB di Kota Gorontalo menerapkan sistem pembinaan program. Pembinaan selalu dilakukan terhadap petugas teknis di lapangan secara triwulan dan semesteran. Dalam hal pembinaan ketenagaan, pada umumnya petugas PLKB yang baru belum mengikuti diklat teknis, sedangkan yang sudah memiliki sertifikat telah dimutasikan ke instansi lain.

Dalam hal pembinaan dana, sarana dan prasarana, Bidang KB pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo cukup mengajukan usulan penganggaran melalui APBD Kota Gorontalo dan usulan APBN melalui BKKBN Provinsi Gorontalo.

Pemantauan melalui supervisi menurut informan selalu dilakukan, baik dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini BKKBN Provinsi Gorontalo. Dalam pengendalian/pengawasan menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan. Setiap pelaksanaan program dilaporkan secara berjenjang dimulai dari Walikota, Gubernur dan Kepala BKKBN Pusat. Hasil kegiatan yang dicapai selama ini menurut para informan penelitian sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan laporan hasil pelaksanaan operasional program KB selalu menjadi bagian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota setiap tahun anggaran.

Di tinjau dari aspek pencapaian tujuan manajemen program KB, pengelolaan Program KB di Kota Gorontalo dapat meningkatkan keterlibatan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada dalam kegiatan operasional. Sumberdaya yang dimanfaatkan tersebut antara lain seperti tenaga teknis/medis, buku-buku dan modul serta sarana penunjang lainnya.

Pengelolaan Program KB juga dilakukan dengan meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana yang ada mengingat jumlahnya yang terbatas. Di samping itu, pengelolaan Program KB di Kota Gorontalo selalu berupaya meningkatkan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat dalam kegiatan operasional. Peran dan partisipasi organisasi kewanitaan, LSM yang bergerak dalam bidang kesehatan dan institusi masyarakat lainnya sangat membatu kelancaran program KB di Kota Gorontalo.

Pengelolaan KB di Kota Gorontalo selalu memantapkan dan mengoptimalkan peran petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai penggerak Program KB Nasional. Semua tenaga teknis seperti PLKB, PKB, PPKBK dan SUBPPKBK merupakan ujung tombak dari kesuksesan program KB di wilayah ini. Oleh karenanya, menurut pendapat para informan penelitian, diperlukan ada penambahan insentif bagi PLKB, PKB, PPKBK dan SUBPPKBK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program KB di Kota Gorontalo dapat memelihara kesinambungan dan keberlanjutan kegiatan operasional program tersebut. Program KB di wilayah ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, dan sudah terbukti dapat membantu PUS untuk mengatur jarak kehamilan dan melahirkan anak yang berkualitas dan menuju keluarga sejahtera dan berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, peneliti menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa manajemen Program Keluarga Berencana di Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan program KB di Kota Gorontalo telah mampu memelihara kesinambungan dan kelanjutan kegiatan operasional program tersebut.
 - b. Dilihat dari indikator pelaksanaan dan pencapaian tujuan manajemen Program KB di Kota Gorontalo dapat dikatakan cukup optimal dan menunjukkan peningkatan, hal ini antara lain dapat dilihat pada keberhasilan Kota Gorontalo memperoleh juara 1 pada kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tingkat Provinsi Gorontalo dan penghargaan tingkat nasional pada Metode Operasi Pria (MOP) vasektomi.
 - c. Dilihat dari indikator perencanaan manajemen program KB di Kota Gorontalo masih kurang optimal antara lain ditinjau dari segi persiapan tenaga pelaksana dalam pengelolaan program KB yakni tenaga PLKB yang masih kurang memadai.
 - d. Dilihat dari indikator pengorganisasian program KB di Kota Gorontalo selama ini masih kurang optimal. Masalah yang ditemukan antara lain tenaga PLKB yang telah memiliki keahlian khusus dan terlatih di bidang KB dimutasi ke instansi lain, akibatnya bidang KB kekurangan tenaga pelaksana. Di tinjau dari OTK (Organisasi dan Tata Kerja) bidang Keluarga Berencana masih merupakan bagian dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, sehingga belum maksimal mendukung efektivitas manajemen program KB di wilayah ini.
 - e. Masalah yang sering ditemui di lapangan dalam pengelolaan Program KB oleh petugas PLKB antara lain masih ada PUS enggan mengikuti Program KB dengan berbagai alasan antara lain takut kegemukan, beragam penyakit akan timbul sebagai efek samping, fenomena ini menunjukkan kurangnya pengetahuan atau kesalahan persepsi sebagian masyarakat tentang alat kontrasepsi atau metode KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2005, *Sosialisasi Program KB Nasional*, Jakarta: BKKBN
- _____, 2005, Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
- Peningkatan Parisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi Daerah*, Penerbit CV Laksana Mandiri: Jakarta
- _____, 2008, *Panduan*, Jakarta: BKKBN
- _____, 2008, *Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo*. Gorontalo: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- _____, 2009, *Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit CV Laksana Mandiri: Jakarta
- _____, 2009, *Undang Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit CV Laksana Mandiri: Jakarta

- Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Brech, C., 1991. *Community Based For Manajemen*. New York. Prentice Hall.
- Devung, S., 1988. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. PPLPTK- Dikti
- Fattah, N., 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fuad, S., 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Widiasarana.
- Glasier, A., dan A. Gebbie., 2005, *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta
- Hanafi, 1994, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Cetakan Pertama, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Handoko, T. H. 1992, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- _____, 2003. *Manajemen (Edisi 2)*, Yogyakarta: BPFE
- Hasan, Z. M., 1990, *Karakteristik Penelitian Kualitatif*, YA3, Malang.
- Herujito, Y., 2003. *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta. Grasindo
- Moleong, L. J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, H., 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Piffner, A., 2000. *Management System*. New York Prentice Hall
- Rahayu, 2004. *Manajemen dan Aplikasinya dalam Organisasi*. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi., 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Suryaningrat, S., 2008, *Gerakan Nasional Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera*, Cetakan Pertama, BKKBN: Jakarta
- Stoner, J. A.F., dan A. Sirait., 1989. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Terry, G.R., 1978, *Principle of Management*, Richard D Irwil Inc., Homewood Illinois.
- _____, 1993. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.